

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13  
TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
MELALUI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN  
SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL KELURAHAN  
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG DI KOTA PADANG**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2017**

## ABSTRAK

**Handoko Pratama, No BP 1110843016, Implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung Di Kota Padang, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2017. Skripsi Ini Terdiri Dari 202 Halaman Dengan Referensi Buku Teori, 11. Buku Metode, 7. Skripsi, 4. Jurnal, 5. Dokumen, 3. Website internet,5.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung Di Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan. Tujuannya adalah untuk membantu Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala dan masalah-masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknis pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, untuk menguji keabsahan data yang didapat dilapangan maka dilakukan teknik triangulasi sumber. Hasil data peneliti, peneliti analisis menggunakan pendekatan model Randall B.Ripley dan Grace A.Franklin.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat kesimpulan bahwa implementasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung di Kota Padang berjalan kurang efektif. Dimana implementor banyak tidak menjalankan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk program. Sedangkan dilihat dari variabel *what happening* meski implementor telah mencukupi namun dalam pelaksanaan tupoksi itu sendiri implementor belum melaksanakannya dengan maksimal. Dari segi garis hirarki baik implementor dengan implementor ataupun implementor dengan *target group* sudah jelas namun tetap dalam proses pelaksanaan cenderung terjadi permasalahan, khususnya hierarki antara implementor dengan masyarakat individu penerima pembiayaan. Sedangkan dalam pengaruh eksternal yang di luar kendali masih kurangnya dana untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program.

**Kata kunci: Implementasi, KJKS-BMT Kecamatan Lubuk Begalung**